

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF**  
(Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)

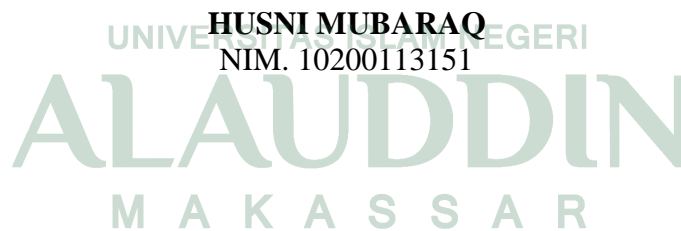


**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam  
(Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin  
Makassar)*

Oleh :

**HUSNI MUBARAQ**  
NIM. 10200113151



**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Husni Mubaraq

NIM : 10200113151

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 28 Februari 1995

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Ekonomi Islam

Alamat : Jl. Andi Djemma Lr.8 A No. 1 Makassar

Judul Skripsi : Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka penelitian dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gowa, November 2019  
Yang Menyatakan,

Husni Mubaraq  
NIM: 10200113151

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad*

Syukur *al-hamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufik-nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Salam dan shalawat tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad ﷺ. beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis, namun berkat izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

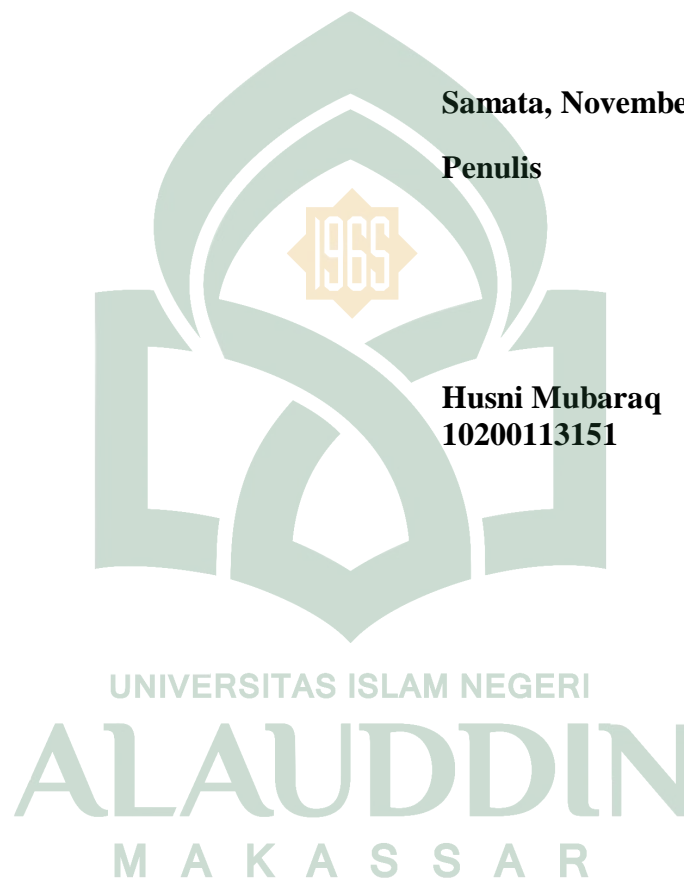
3. Bapak Ahmad Efendi, S.E., M.M. dan bapak Akramunnas, SE., M.Si. Masing-masing ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, atas segala bantuan dan bimbingannya.
4. Bapak Dr. Syaharuddin, M.Si., selaku pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Bapak Akramunnas, SE. M.Si. selaku Munaqis I dan Ibu Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M. selaku Munaqis II yang telah memberikan arahan, kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan ilmunya tanpa pamri terhadap penulis.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Drs. H. Masdin Abdi dan Ibunda Hj. Andryani Baso tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, perhatian, motivasi, dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulis sampai sekarang ini.
8. Seluruh rekan-rekan penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu. Bantuan mereka berupa materi dan non materi sangat mendukung kesuksesan penulis dalam mengikuti studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Hanyalah doa keselamatan dan permohonan rahmat Allah swt., penulis peruntukkan kepada mereka yang telah turut membantu penulis selama ini. Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi segenap pihak khususnya kepada penulis sendiri.

**Samata, November 2019.**

**Penulis**

**Husni Mubaraq  
10200113151**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-6</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9-42</b>
A. Efektivitas .....	9
B. Zakat .....	12
C. Lembaga Amil Zakat .....	22
D. Pengelolaan Zakat.....	29
E. Kerangka Konseptual.....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44-49</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Jenis Sumber Data .....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	47
G. Pengujian Keabsahan Data .....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50-74</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	50
B. Pemanfaatan Dana Zakat.....	58
C. Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75-76</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Arsip Dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah.....	67
Tabel 4.2 Arsip Dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah.....	69
Tabel 4.3 Tolak Ukur Efektivitas Menurut Cambel J.P.....	70
Tabel 4.4 Indikator LAZIS Wahdah IslamiyahMakassar .....	71





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual .....	43
Gambar 4.1 Skema Direksi Wahdah Islamiyah .....	54



## **ABSTRAK**

**Nama : Husni Mubaraq**

**NIM : 10200113151**

**JUDUL : Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam efektivitas dana zakat produktif, apakah pengelolaannya dinilai efektifitas untuk memberdayakan umat sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Uji keabsahan data yang digunakan ialah metode triangulasi, reduksi data, penyajian data yang selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan, pengujian keabsahan data dengan melakukan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan dana zakat produktif telah disalurkan dinilai efektif dari segi pemberdayaan di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar, namun dalam pengelolaannya dinilai tidak efektif dalam menyalurkan dana zakat produktif.

Kata Kunci : Efektivitas, Zakat Produktif

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Keberhasilan suatu negara dalam sistem pembangunannya apabila negara tersebut mampu menekan angka kemiskinan. Tingkat kesejahteraan suatu negara berpengaruh dalam kancan internasional, maka dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan merupakan suatu tantangan bagi setiap negara. Jumlah kemiskinan tersebut mempengaruhi negara dikatakan negara maju, berkembang, atau miskin. Kondisi inilah yang membuat negara tersebut termotivasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Mayoritas penduduk yang berada di negara Indonesia beragama Islam, di kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pengaruh-pengaruh ajaran Islam. Islam mengatur seluruh aktivitas ummat baik *habluminallah* (hubungan dengan Allah) maupun *habluminannas* (hubungan dengan manusia), sehingga dengan adanya keseimbangan yang relevan antara dunia dan akhirat. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, salah satu perintah Allah ialah membayar zakat.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang sosial. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Telah

---

<sup>1</sup> Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik, Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 69.

diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam, namun keadaan umat Islam masih jauh dari kondisi yang sejahtera, faktor rendahnya kemampuan ekonomi yang tidak merata memicu kurangnya penyaluran zakat di Indonesia.

Pengelolaan dana ZIS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Dalam bagian penjelasan secara eksplisit menyebutkan tujuan dari dibuatnya UU mengenai pengelolaan ZIS adalah untuk mendongkrak daya guna dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Karena itu pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Lembaga Amil Zakat harus mampu membuat para *muzakki* percaya untuk menyalurkan dana wajib zakatnya kepada lembaga ambil zakat, dalam rangka menyukkseskan lembaga amil zakat tersebut. Zakat harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang kredibel, amanah, serta transparan dalam penyaluran zakatnya kepada umat Islam yang membutuhkan.

Pencataan dalam setiap aktivitas pendistribusian zakat kepada masyarakat adalah bentuk upaya laporan pertanggungjawaban kepada para *muzakki* dan

---

<sup>2</sup>Siti Maria Wardayati Dan Siska Putri Imaroh, *Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember)*, Analisa Journal of Social Science and Religion Volume 22 No. 02 Desember 2015, h. 228

masyarakat umum. Laporan pertanggungjawaban tersebut dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dengan jelas dipahami oleh *muzakki* dan masyarakat umum. Sebagai institusi publik, kepercayaan merupakan hal vital dan kepercayaan hanya mungkin dapat diraih bila unsur-unsur bagi tumbuhnya kepercayaan yaitu profesionalitas dan amanah yang dibuktikan oleh ketepatan pencatatan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas itu dipenuhi. Letak perbedaan antara organisasi pengelola dana ZIS dengan organisasi konvensional adalah diukur sejauh mana kesesuaiannya dengan syariah, dan tidak hanya semata-mata diukur dari efisiensi dan efektivitasnya.<sup>3</sup>

Pada masa ini, keberadaan sistem informasi dinilai sangatlah penting bagi keberlangsungan setiap badan usaha, hal ini untuk mempermudah dalam setiap interaksi sehari-hari yang mana dapat mempercepat dan mengefektifkan waktu operasionalnya. Pada dasarnya, sistem informasi memiliki fungsi seperti mencatat, mengumpulkan, menyimpan dan memberi laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan setiap badan usaha dan organisasi.

Menurut kepala KEMENAG RI kota Makassar, Muh Nur Halik menyatakan bahwa potensi zakat di kota Makassar hampir mencapai Rp. 7 triliun setiap tahunnya, tentunya ini disebabkan adanya kerjasama seluruh elemen masyarakat yang ada di

---

<sup>3</sup>Sri Mulyani, *Analisis Sistem Laporan Dana Zis Pada Baitul Maal Muamalat (Bmm) Jogjakarta, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* Vol. 5 No. 2 Oktober 2008, h. 176

kota Makassar.<sup>4</sup> Berdasarkan dari hasil rapat kerja BAZNAS kota Makassar menargetkan untuk mengumpulkan zakat ditahun 2018 sebesar Rp. 16 Milyar, yang mana target di bulan September telah mencapai Rp. 9,5 Milyar.<sup>5</sup> Hal ini menjadi tolak ukur yang sangat jauh dibanding dengan potensi zakat yang begitu besar jumlahnya.

Salah satu lembaga amil zakat di kota Makassar yaitu LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah merupakan sebuah lembaga di bawah naungan ORMAS Wahdah Islamiyah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dari kaum muslimin. Dana ZIS yang dikelola LAZIS DPP-WI telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi dakwah Islamiyah, serta pihak-pihak yang layak menerima bantuan ZIS. Visi misi yang ditanamkan dengan membangun LAZNAS WI yang amanah, transparan, profesional dan mensejahterakan ummat dengan cara mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS kepada *mustahiq* yang sesuai dengan target.<sup>6</sup>

LAZIS DPP-WI sejak tahun 1423 H/ 2002 M telah berpengalaman untuk menyalurkan dana ZIS kaum muslimin untuk pengembangan dakwah Islamiyah maupun pertolongan kepada sebagian umat Islam yang layak menerimanya, diantara lain adalah, bidang dakwah, bidang informasi dan komunikasi, bidang kesehatan,

---

<sup>4</sup>Asrhawi Muin, “Kemenag Sebut Potensi Zakat di Makassar Sangat Besar”, *Sulselsatu Online*. 18 November 2018. <http://www.sulselsatu.com> (14 Februari 2019).

<sup>5</sup>Fahrizal Syam, “Hingga September 2018, Baznas Makassar Kumpulkan Zakat Rp. 9,5 Milyar,” *Tribun Makassar Online* 29 oktober 2018, [makassar.tribunnews.com](http://makassar.tribunnews.com) (14 Februari 2018).

<sup>6</sup> Wahdah, “Profil Lazis Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah*. <http://wahdah.or.id> (14 Februari 2019).

bidang pendidikan, bidang sosial, bidang pemberdayaan muslimah, bidang pembangunan masjid dan fasilitas umum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KEMENAG dan BASNAZ dalam uraian latar belakang ini mengenai pencapaian dana zakat yang masih sangat jauh dari target dan potensi yang ada di kota Makassar maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP Wahdah Islamiyah Kota Makassar)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan dana zakat produktif bagi *mustahiq* yang diberikan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana zakat produktif di LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif bagi *mustahiq* yang diberikan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat produktif di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ialah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis mengenai efektivitas sistem pengelolaan dana zakat produktif di kota Makassar dalam perspektif ekonomi Islam pada LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar.
2. Sebagai informasi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, khususnya jurusan ekonomi Islam serta peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan lebih lanjut dengan topik yang sama.

#### **E. Kajian Pustaka**

Peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. Peneliti juga menggali lebih dalam informasi melalui referensi buku-buku maupun skripsi untuk mendapatkan informasi teori-teori yang berkaitan dengan judul. Adapun beberapa yang peneliti dapatkan ialah :

1. Jurnal penelitian Rinol Sumantri salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul Efektivitas Dana Zakat Pada Mustahik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan Cibest yang menyimpulkan bahwa dari program zakat community development yang dibuat oleh BAZNAS berkontribusi dengan cukup baik untuk menambah



kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Banyuasin, namun belum mencapai titik yang signifikan, hal ini disebabkan minimnya pengawasan dan bimbingan teknik dari pihak BAZNAS dalam menjalankan program tersebut, adapun halnya dengan pendekatan CIBEST juga ada perubahan tetapi belum signifikan, dikarenakan masyarakat teluk payo masih lebih banyak yang mementingkan mencari nafkah dari pada beribadah.<sup>7</sup>

2. Skripsi Agung Pandu Dwipratama salah satu mahasiswa di Unieversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional menyimpulkan bahwa sistem informasi manajemen zakat, infak, dan sedekah yang dirancang oleh BAZNAS terdiri dari penerimaan donasi zakat, infak dan sedekah dari *muzakki* BAZNAS dan pendistribusian donasi dengan secara langsung kepada *mustahiq*. Sistem ini telah terkomputerisasi dan menjadi solusi alternatif untuk membantu kelancaran proses manajemen ZIS, namun perlu adanya pengembangan dari segi modal akuntansi zakat dalam mencatat transaksi akuntansinya serta membuat fitur keamanan agar data tidak mudah di manipulasi oleh oknum tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rinol Sumantri, “Efektifitas Dana Zakat Pada Musathik Zakat Community Development Sumatera Selatan Dengan Pendekatan CIBEST”, *jurnal ekonomi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017. (Diakses Tanggal 8 Januari 2018)

<sup>8</sup> Agung Pandu Dwipratama, “Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 197. (Diakses Tanggal 8 Januari 2018)

3. Sementara dalam penelitian Nani Hamdani Amir “Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan”. Dalam upaya pengelolaan dana infak dan sedekah yang dilakukan oleh sekolah Al-Fityan cabang Gowa untuk membantu anak yatim piatu bersekolah memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan para anak yatim tersebut. Hal inilah yang patut didorong untuk bisa maju agar tidak ada lagi anak-anak yang tak merasakan pendidikan dikarenakan keterbatasan biaya. Pemanfaatan infak dan sedekah yang dikelola oleh Yayasan Al-Fityan Cabang Gowa yang berjumlah 39 orang tidak hanya pendidikannya saja yang diperhatikan akan tetapi dari segi kebutuhannya seperti menjamin makanya 3 kali dalam sehari, membiayai kesehatan anak yatim jika ada yang sakit dan membiayai kebutuhan sehari-hari seperti perlengkapan mandinya.<sup>9</sup>
4. Jurnal Penelitian Teguh Ansori yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *mustahiq* Pada Lazisnu Ponorogo. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendataan di LAZISNU Ponorogo terbilang akurat, dengan cara pengajuan proposal oleh calon *mustahiq* kepada LAZISNU dan identifikasi *mustahiq* oleh amil.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Nani Hamdani Amir, “Pengelolaan Dana Infak Dan Sedekah Dari Orang Tua Siswa Pada Sekolah Al-Fityan (Studi Yayasan Al-Fityan School Cabang Gowa)”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2017) h. 61. (Diakses Tanggal 8 Januari 2018)

<sup>10</sup> Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2018) <http://www.researchgate.net> (Diakses tanggal 1 Maret 2019).

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mana mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Ada efeknya (akibatnya, pengaruh, dan kesan),
- b. Manjur atau mujarrab,
- c. Membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI) dari arti-arti yang telah disebutkan muncul kata keefektifan yang berarti dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran, dan keberhasilan.<sup>11</sup> Secara etimologi, efektif adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *effective* kemudian dikembangkan lagi menjadi efektivitas. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>12</sup>

Efektivitas menurut ensiklopedia umum ialah menunjukkan taraf tercapainya tujuan. Usaha dikatakan efektif jika, usaha tersebut mencapai tujuannya secara

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 284.

<sup>12</sup>Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) h. 126

ideal.<sup>13</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pada pelaksanaannya dinilai baik atau tidak bergantung pada cara tugas tersebut dapat diselesaikan, terutama dapat menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakan dan berapa biaya yang diperlukan.<sup>14</sup>

Menurut pendapat H. Emerson yang di kutip Soewarna Handyaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administari dan Managemen menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>15</sup> Pengertian secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, yang mana makin besar persentase yang dicapai, maka makin tinggi pula efektivitasnya.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan *output* yang dicapai dengan *output* yang diharapkan

---

<sup>13</sup>A.B. Pridodgdo Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet. Ke-8, h. 196

<sup>14</sup>Sondang P. Siagian, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990), cet. Ke - 5, h. 149.

<sup>15</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administari dan Managemen*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), h. 15.

<sup>16</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 10.

dari sejumlah *input*.<sup>17</sup> Berdasarkan beberapa pendapat pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu.

## 2. Tolak Ukur Efektivitas Program

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :<sup>18</sup>

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua

---

<sup>17</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, h. 10.

<sup>18</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simomora.(Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121

tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>19</sup>

## **B. Zakat**

### **1. Definisi Zakat**

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dikatakan *zakaz-zar'u tatkala tatanaman* itu tumbuh dan apabila dikatakan *zakaa fulaanun* berarti si Fulan itu banyak kebajikannya. Zakat menurut *syarak* ialah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang di berikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerima. Dalam istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*).

Dalam pengertian istilah *syara'*, zakat mempunyai banyak pemahaman, di antaranya :

- a. Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak
- b. Menurut Wahidi, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zakat artinya tumbuh, sedangkan tiap suatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah.

---

<sup>19</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simomora, h. 47.

- c. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.
- d. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya Al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
- e. Menurut Monzer Kahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalam sistem ekonomi islam makro. Sebab zakat dapat mengendalikan: (a) pengalokasian harta produktif diantara berbagi manfaat alternative, (b) sarana produktif yang tidak produktif, (c) pengalokasian pendapat diantara pengeluaran dan tabungan, (d) pengalokasian tabungan-tabungan mewah diantara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna.
- f. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata

dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertamah, suci dan beres (baik).

Tujuan utama dari zakat adalah untuk mengembangkan pertumbuhan sosial ekonomi yang seimbang, dan untuk memurnikan jiwa dan kekayaan seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah SWT (Tuhan). Serta zakat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal, maka dari itu dibutuhkan suatu Organisasi Pengelola Zakat, yang dapat mengatur dan mendistribusikan zakat secara adil dan merata.<sup>20</sup>

Agar zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat.<sup>21</sup>

Badan amil zakat sebagaimana badan atau lembaga nirlaba, tidak berorientasi pada profit laba operasionalnya. Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi sektor

---

<sup>20</sup>Rani Rahmat, dkk, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amilzakat Nasional Kabupaten Buleleng)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017),h. 2.

<sup>21</sup> Sumadi, *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03, No. 01, Maret 2017, h.17.



publik tentu saja memiliki stakeholders (pihak yang berkepentingan) yang sangat luas. Konsekuensinya Badan Amil Zakat dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas lembaga.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Landasan hukum zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah/ 9:18 :

Q.S At-Taubah/ 9 : 18 :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ  
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ...

Terjemahnya:

“Sungguh, yang menyemarakkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan shalat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapa-siapa kecuali Allah...”<sup>23</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang beriman ialah yang mengerjakan amal saleh dengan memakmurkan masjid, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta memiliki rasa takut kepada Allah dengan menjauhi larangan-Nya dan mengerjakan segala perintah-Nya. Salah satu perintah tersebut ialah dengan menunaikan zakat.

<sup>22</sup>Sabrina Shahnaz, *Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 316.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Syamil Qur'an), h. 189

Selain itu, hukum zakat juga tertuang dalam Q.S At-Taubah/ 9 : 103 :

Q.S At-Taubah/ 9 : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>24</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda. Kedua ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta.<sup>25</sup>

Berbagai hadis nabi diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al darurah*. Di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya zakat, lantaran hikmah dan manfaatnya yang

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

<sup>25</sup> Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 69.

amat strategis. Wahbah Zuhaili menjelaskan hikmah tersebut sebagai berikut:

1. Menjaga harta orang-orang kaya dari incaran tangan penjahat
2. Memotivasi orang-orang fakir (dan mustahiq lainnya) untuk lebih giat bekerja memenuhi kebutuhannya.
3. Menyucikan jiwa dari sifat kikir dan mendidik sifat kedermawanan
4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikanNya.<sup>26</sup>

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar (Khalifah I) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau yang menyatakan dengan tegas; “Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat.” Orang yang enggan menunaikan zakat dan mendapat azab di akhirat.

Q.S At-Taubah 9/34-35 :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

<sup>26</sup>M. Sularno, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV, No. 1, Juli 2010.h. 36-37.

Terjemahan:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan pada emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka: “inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang sanksi bagi orang yang mampu membayar zakat namun, tidak mengeluarkan zakatnya, yaitu kelak di hari akhir mereka akan dimasukkan ke neraka jahannam lalu mereka akan di bakar dari dahi, lambung hingga punggung mereka, serta mereka akan merasakan pedihnya api neraka akibat apa yang mereka lakukan di dunia. Demikianlah berat sanksi hukum bagi orang yang enggan menunaikan zakat dan infak.<sup>28</sup>

### 3. Jenis –jenis zakat

Secara garis besar zakat terjadi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan, terkadang zakat fitrah disebut dengan zakat badan atau zakat fitrah.
- b. Zakat Mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.17-18

<sup>29</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar Alauddin Pres, 2011), h.4.

#### 4. Kelompok Penerima Zakat

Adapun yang berhak menerima zakat, yaitu:

- a. *Al-Fuqara* (orang-orang fakir) adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Hal tersebut terdapat dalam Q.S az-Zariyat/ 51 : 16;

ءَاخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya hak orang miskin terhadap zakat orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

- b. Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. *Al-Amilin* (pengurus zakat), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Al-Muallaf Qulubuhum*, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

---

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

- e. *Ar-Riqab*, memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang yang kafir.
- f. *Al-Gharimin*, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. *Sabilillah*, untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.
- h. *Ibnu Sabil*, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>31</sup>

Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat, adalah kelompok orang-orang berikut :

- 1) Turunan nabi Muhammad.
- 2) Kelompok orang kaya.
- 3) Keluarga muzakki, yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

---

<sup>31</sup>Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 81-82.

- 4) Orang yang sibuk terlibat sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan kewajibannya mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan.
- 5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama<sup>32</sup>

#### 5. Undang- Undang Pengelolaan Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diaatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri Agama No.581 Tahun 1999 dan keputusan Direktut Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya.<sup>33</sup>

Namun setelah berjalan semua lebih dari sepuluh tahun, UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal maka muncullah dorongan untuk mengubah dan memperjelas substansinya agar lebih mengarah pada tujuan yang lebih terukur. Beberapa alasan perubahan tersebut antara lain adalah : tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengumpulkan, mengelolah dan

---

<sup>32</sup>Sri Mulyani, *Analisis Sistem Laporan Dana Zis Pada Baitul Maal Muamalat (Bmm) Jogjakarta, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* Vol. 5 No. 2 Oktober 2008, h. 180

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan pemberdayaan zakat*, (Yogyakarta: Nuangsa Aksara 2006), h.165.

mendistribusikan zakat, sebelum jelasnya penentuan wajib zakat, barang yang memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi.<sup>34</sup>

### **C. Lembaga Amil Zakat**

#### **1. Amil Zakat**

Amil adalah para pekerja yang telah disertai penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam. Menurut Quraish Shihab, dengan menafsirkan rangkaian kata “*amilina alatha*” amil memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut, mencakup kepentingan sedekah.<sup>35</sup>

Syarat-syarat menjadi amil zakat adalah:<sup>36</sup>

- a. Orang Islam (muslim)
- b. Orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya (mukallaf)
- c. Orang jujur
- d. Orang yang memahami hukum-hukum zakat
- e. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas

---

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dalam Pemberdayaan Zakat, 2012), h.33.

<sup>35</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), cet I, h. 76.

<sup>36</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Rosdakarya 2011), cet 5, h. 174.



- f. Laki-laki
- g. Bukan orang yang berstatus hamba sahaya.

## 2. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak, maupun sedekah. Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional yang pengelolaannya diurus oleh pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat.

### a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. Mendefinisikan Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam tingkatannya Badan Amil Zakat Nasional memiliki tingkatan sebagai berikut:

- 1) Badan Amil Zakat Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama;
- 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;

- 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul dari Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah LAZ berskala nasional, dan LAZ berskala kabupaten/kota yang mendapat izin resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat, maka dibentuklah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat yang mana hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Pembentukan UPZ ini diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

#### b. Lembaga Amil Zakat

Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Lembaga Amil Zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>37</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Diakses pada 25 Februari 2019 jam 17.15.

Ada beberapa alasan mengapa zakat perlu ditunaikan melalui lembaga, yaitu antara lain:

- 1) Kalau setiap *muzakki* membayar zakat melalui lembaga, maka akan dapat sikap “egois” *muzakki* , yang seolah memandang harta zakat adalah miliknya semata.
- 2) Dengan penyaluran zakat melaui lembaga maka tidak akan terjadi proses “perendahan” *mustahiq*. Karena *mustahiq* tidak secara langsung berhubungan dengan *muzakki*.
- 3) Jika zakat diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada individu *mustahiq*, maka tidak dapat dicapai pemerataan, keadilan dan ketetapan sasaran.
- 4) Sudah menjadi fitrah manusia, apabila mengamanahkan dana besar maka seharusnya melalui “lembaga”, bukan kepada perorangan. Karena jika kepada perorangan yang muncul kemudian adalah rasa ketidakadilan masyarakat manakala dana besar diberikan kepada satu orang atau dua orang.
- 5) Kalau tidak dikelola (melalui lembaga), maka potensi zakat yang besar tidak dapat dimobilisasi dan didayagunakan untuk keperluan strategis umat.<sup>38</sup>

Kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, yakni mengumpulkan dan meyalurkan zakat. Dalam penyalurannya, Badan Amil Zakat wajib menyalurkan dan

---

<sup>38</sup> Hidayat Nur Wahid, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), h.60.

zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>39</sup>

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu Negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelolaan zakat haruslah bersifat:<sup>40</sup>

- 1) Independent, lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
- 2) Netral, karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan). Karena jika tidak maka tindakan itu telah menyakiti donatur.
- 3) Tidak berpolitik (praktis), lembaga ini jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis, hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

---

<sup>39</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang 2010), h.21.

<sup>40</sup> Umrotun Kasanah, *Manajemen Zakat Modern*, cet 1, (Malang: UIN Maliku Press, 2010), h. 170.

4) Tidak bersifat diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal.

Dimana pun, kapanpun, siapapun, dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syari'ah maupun secara manajemen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peran serta masyarakat untuk membentuk lembaga amil zakat yang sepenuhnya diurus atas prakarsa masyarakat sendiri, dan secara resmi diakui pemerintah. Mereka ini memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahwa pemerintahan mengukuhkan, membina, dan melindungi lembaga amil zakat dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum.
- 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 3) Memiliki pengawas syariat.
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 5) Bersifat nirlaba.

6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>41</sup>

### 3. Tugas Lembaga Pengelola Zakat

Secara umum, lembaga amil zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, dan mengelola zakat. Melihat fungsi-fungsi tersebut diketahui bahwa personil amil zakat memiliki tugas pokok antara lain:<sup>42</sup>

- a. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- b. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan *muzakki* dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki*.
- c. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahiq* konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
- d. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan-pendataan *mustahiq* produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
- e. Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan, dan menginventarisir harta zakat.

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 57.

<sup>42</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 129.

#### **D. Pengelolaan Zakat**

Secara etimologi, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi dan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>43</sup>

Sedangkan, terminologi pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Jadi, pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawas dalam pelaksanaan zakat.<sup>44</sup>

Menurut Sahal Mahfudz, menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat, akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusianya.

---

<sup>43</sup> KBBI, *Kelola*, <http://kbbi.web.id/keola> (Diakses tanggal 1 Maret 2019).

<sup>44</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea press Yogyakarta, 201, h.6.

Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan.<sup>45</sup>

Pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan zakat.<sup>46</sup> Terdapat pula asas pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat antara lain:<sup>47</sup>

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian Hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 3, ialah:<sup>48</sup>

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

---

<sup>45</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, h.6.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1.

<sup>47</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 2.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 3.



#### a. Perencanaan Zakat

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan, merencanakan (merancang).<sup>49</sup> Menurut Malayu S.P Hasibuan, perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai tujuan yang diinginkan.<sup>50</sup>

Perencanaan pengelolaan zakat mengandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan, pengelolaan, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Terdapat unsur-unsur perencanaan dalam Badan Amil Zakat, antara lain:<sup>51</sup>

- 1) Perencanaan Sosialisasi
- 2) Perencanaan Pengumpulan Zakat
- 3) Penggunaan Zakat
- 4) Perencanaan Pengawasan Zakat

Sedangkan perencanaan kerja Lembaga Amil Zakat menurut Umrotul Khasanah, antara lain:<sup>52</sup>

- 1) Pendataan *Mustahiq* dan *Muzakki*

---

<sup>49</sup> KBBI, *Perencanaan*, <http://kbbi.web.id/keola> (Diakses tanggal 1 Maret 2019).

<sup>50</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen edisi revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 93

<sup>51</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2006), h. 23.

<sup>52</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliku Press, 2010), h. 173.

- 2) Proyeksi Perolehan Zakat
- 3) Perencanaan Publikasi Iklan
- 4) Perencanaan Program Pemberdayaan

Rencana kerja tersebut disusun oleh BAZ dan LAZ berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dalam struktur Badan Pelaksana, dan juga pada kondisi lapangan dan kemampuan dukungan sumber daya yang tersedia.

#### b. Pengoordinasian Zakat

Pengoordinasian adalah pengelompokkan dan pengaturan sumber daya manusia untuk digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.<sup>53</sup> Pengoordinasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengoordinasian zakat meliputi tiga hal, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.<sup>54</sup>

#### 1) Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan,

---

<sup>53</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Model Pengelolaan yang Efektif*, h. 24.

<sup>54</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1.

perhimpunan, pengerahan.<sup>55</sup> Pengumpulan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>56</sup>

Selalu ada proses “mempengaruhi” dalam pengumpulan dana. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan. Pengumpulan dana sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk membayar zakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon *muzakki*, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga Pengelola Zakat.<sup>57</sup> Sistem pengumpulan zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat (1) bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, *muzakki* melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) dalam hal

---

<sup>55</sup> KBBI, *Pengumpulan*, <http://kbbi.web.id/keola> (Diakses tanggal 1 Maret 2019).

<sup>56</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirc, 2006), h. 11.

<sup>57</sup> Ahmad Furqon, *Mnajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),h. 36

tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZNAS.<sup>58</sup>

Menurut Furqon, ada beberapa tujuan dalam pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut :<sup>59</sup>

a) Menghimpun Zakat

Munghimpun dana adalah merupakan tujuan pengumpulan dan yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelola zakat.

b) Menghimpun *Muzakki*

Tujuan kedua dari pengumpulan dana adalah menambah calon *muzakki*. Amil zakat yang melakukan pengumpulan dana harus terus menambah jumlah *muzakki*, untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah jumlah donasi dari setiap *muzakki* atau menambah jumlah *muzakki* baru.

c) Menghimpun *volunteer* dan pendukung yang telag berinteraksi dengan aktivitas pengumpulan dana yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat.

d) Meningkatkan atau membangun citra lembaga *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.

e) Memuaskan *Muzakki*

---

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 1.

<sup>59</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h.36.

Kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

Sedangkan dalam metode pengumpulan zakat terdapat dua pola dalam pelaksanaannya, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).<sup>60</sup>

- a) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* yang mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dalam metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *direct mail elektronik* seperti *faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.
- b) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Sebagai contoh dalam metode ini adalah: *advertorial*, *image company*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui refrensi, dan media para tokoh.

---

<sup>60</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 42.

## 2) Pendistribusian Zakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>61</sup> Jadi distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu *mustahiq*.<sup>62</sup>

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.<sup>63</sup>

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menyebutkan bahwa zakat wajib di distribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam.<sup>64</sup> Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip

---

<sup>61</sup> KBBI, *Pendistribusian*, <http://kbbi.web.id/distribusi> (Diakses 1 Maret 2019)

<sup>62</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 132

<sup>63</sup> Saifudiin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 53

<sup>64</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 25.

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>65</sup>

Adapun yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk penuntasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat.<sup>66</sup> Sedangkan asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.<sup>67</sup> Sedangkan asas kewilayahan adalah pengelolaan zakat diutamakan didistribusikan kepada *mustahiq* di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua *mustahiq* sudah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada *mustahiq* diluar wilayah lembaga zakat itu berada.<sup>68</sup>

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung atau zakat produktif.<sup>69</sup>

#### a) Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

##### (1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal

<sup>65</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 26.

<sup>66</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 82.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 2.

<sup>68</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 82.

<sup>69</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 82.

(2) Bantuan pendidikan

- (a) Mendirikan dan membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren
- (b) Pembangunan sarana prasarana ketrampilan
- (c) Membangun perpustakaan
- (d) Beasiswa

(3) Sarana kesehatan

- (a) Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin
- (b) Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin

(4) Sarana sosial

- (a) Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia
- (b) Membangun rumah singgah bagi gelandangan
- (c) Membangun rumah bagi disabilitas

b) Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahiq*, untuk memproduktifkan *mustahiq*, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2001 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok *mustahiq* dalam bentuk zakat konsumtif terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan *mustahiq*, dengan pola zakat produktif dapat mengubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*, karena dengan modal



usaha yang dimiliki, seorang *mustahiq* dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat.<sup>70</sup>

Bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya, diantaranya:

- (1) Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi
- (2) Bantuan pendirian tempat usaha
- (3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai *event* dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya
- (4) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin kelanjutan usaha
- (5) Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi Hasil (LEB)
- (6) Pembangunan industri yang melibatkan *mustahiq-mustahiq* sebagai pekerjanya

Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik-pabrik atau perusahaan, yang mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir-miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi. Hanya saja akan lebih baik, apabila sebelumnya ada izin atau

---

<sup>70</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, h. 85.

pemberitahuan kepada para *mustahiq* bahwa bagian zakat untuk mereka akan dikembangkan produktif yang mana hasilnya untuk mereka.<sup>71</sup>

### 3) Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan *ashnaf*). Adanya pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Demikian pemberdayaan adalah upaya memperkuat sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.<sup>73</sup>

Pemberdayaan dana zakat terhadap para *mustahiq* produktif hendaknya

---

<sup>71</sup> Saifudiin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, Skripsi, h. 113-114.

<sup>72</sup> KBBI, *Pendayagunaan*, <http://kbbi.web.id/dayaguna> (Diakses tanggal 1 Maret 2019)

<sup>73</sup> Muhammad Hasan, “*Manajemen Zakat*”, h. 196.

dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang jelas. Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan mengajukan syarat-syarat pemberdayaan/pendayagunaan zakat sebagai berikut:<sup>74</sup>

- (a) Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- (b) Mendapat persetujuan dari dewan-dewan pertimbangan
- (c) Usaha *mustahiq* di wilayahnya masing-masing

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahiq* konsumtif maupun produktif perlu memperhatikan faktor-faktor pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahiq* zakat, sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada *mustahiq* produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.<sup>75</sup>

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 menjelaskan bahwa:<sup>76</sup>

- (a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat

---

<sup>74</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), h. 41

<sup>75</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, h. 88.

<sup>76</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 27.

- (b)Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi
- (c)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

Zakat produktif adalah pemberdayaan dana zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, yang mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>77</sup>

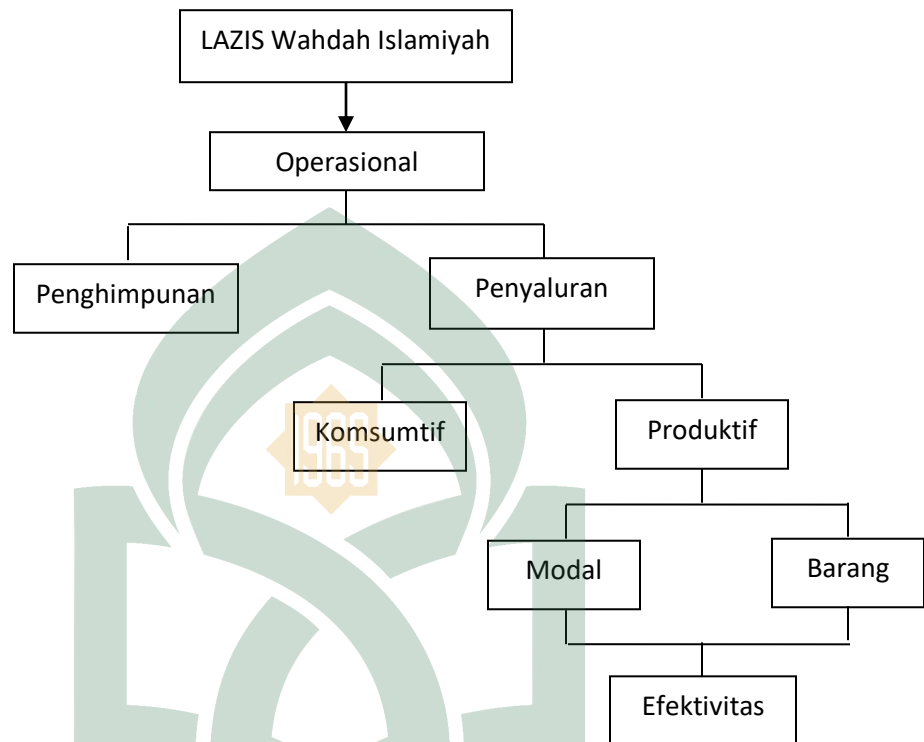
#### **E. Kerangka Konseptual**

LAZIS DPP Wahdah Islamiyah Makassar dalam pengelolaan dana zakat menghimpun dana dari masyarakat (*Muzakki*) yang memiliki harta *haul* dan *nisab* sudah terpenuhi dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (*Mustahiq*). Pengelolaannya dana *mustahiq* tersebut di lakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif.

Dana zakat produktif disalurkan dengan memberikan bantuan modal maupun barang kepada para *mustahiq* untuk keberlangsungan hidup yang panjang dan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Berikut adalah kerangka pikir dari hasil pembahsan yang telah dijelaskan :

---

<sup>77</sup> Asnanini, Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam, Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 64.



Gambar 2.1 : Skema kerangka konseptual

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang nantinya akan menganalisis data yang mendalam dan merupakan bentuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengetahui dan menafsirkan secara insentif tentang latar belakang keadaan masa kondisi masa kini, dan interaksi lingkungan sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>78</sup>

Lokasi Penelitian ini dilakukan di LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Jl. Perintis Kemerdekaan, Tello Baru, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90233.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang dilakukan peneliti melalui interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Pendekatan sosiologi juga mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya.<sup>79</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pengelolaan dana zakat produktif khususnya di Lembaga Amil Zakat DPP Wahdah Islamiyah kota

---

<sup>78</sup>Nur Indrianto Dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 146.

<sup>79</sup> Lihat, Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

Makassar

### **C. Jenis Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Data primer, data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Data sekunder, data yang dikumpulkan dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.<sup>80</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat perusahaan dan laporan pengelolaan dana zakat produktif pada LAZIS DPP Wahdah Islamiyah Kota Makassar.

---

<sup>80</sup>Istijanto Oei, *Sumber Daya Manusia : Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja, dan Aspek-Aspek Kerja Karyawan Lainnya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 33.

<sup>81</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: BumiAksara, 2003), h. 117.

2. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas.
3. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pengurus/karyawan atau pimpinan LAZIS DPP Wahdah Islamiyah Kota Makassar. Berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian ialah aspek yang terpenting dalam pengumpulan data karena keberhasilan dari pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data, sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang teliti telah mampu menjawab tujuan penelitian. Beberapa alat-alat pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

1. Pedoman wawancara
2. Alat tulis
3. Informan yang akan diwawancarai
4. Dokumen atau literatur yang menyangkut tentang penelitian tersebut
5. Handphone sebagai alat dokumentasi atau untuk merekam hasil wawancara

---

<sup>82</sup> Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2014), h.372.



## **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:<sup>83</sup>

### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Di dalam reduksi data dapat dilakukan:<sup>84</sup> a) Proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data, b) menyusun data dalam satuan-satuan sejenis, mengelompokkan data ini juga dapat di equivalenkan sebagai kegiatan kategorisasi atau variabel, c) membuat koding data sesuai kisi-kisi kerja penelitian.

### **2. Penyajian data**

Di dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang paduh dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan

---

<sup>83</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), h. 243.

<sup>84</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 245.

menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis data. Verifikasi dilakukan secara terus menerus untuk proses penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan pemikiran yang melintasi pikiran peneliti selama menulis dengan merujuk kembali pada catatan lapangan.

#### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara, yakni melakukan triangulasi data yaitu mengecek kebenaran data dengan cara membanding data dengan sumber lain. Triangulasi dapat dilakukan dengan menguji proses dan hasil metode yang dilakukan setelah berjalan dengan baik, hal ini tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Ketika meneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data, peneliti harus memastikan bahwa setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi.
2. Peneliti memastikan kembali uji silang terhadap materi catatan-catatan harian peneliti dengan informasi yang diperoleh dari informan, agar jika terdapat

ketidakrelevanan antara informasi yang peneliti dapat dengan wawancara, peneliti harus mengonfirmasinya kembali kepada informan.

3. Hasil informasi yang telah peneliti peroleh perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya, karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaan dari materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 260.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah dan Perkembangan LAZIS Wahdah Islamiyah**

Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1998 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH No.20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH. Fathul Muin Dg. Mangading (Seorang ulama kharismatik Sulsel yang masa hidupnya menjadi Pembina para pendiri YFM) dan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Ummat, pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No. 059.

Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH No. 055 tanggal 25 Mei 2000.

Perkembangan Dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk Yayasan, maka dalam Musyarawah YPWI ke-2 tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2002 M) disepakati mendirikan organisasi massa (ormas) dengan nama yang sama, yaitu

Wahdah Islamiyah (WI). Sejak itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya ormas WI disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.

Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al Qur'an dan As sunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah). Organisasi ini bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup.<sup>86</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada kantor pusat Lembaga Amil Zakat (LAZIS) Wahdah Islamiyah yang berada di Kota Makassar tepatnya di Jl. Urip Sumoharjo Km. 7 Tello baru, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan masyarakat binaan LAZIS Wahdah Islamiyah di Kota Makassar yang terdiri dari tiga tempat penelitian usaha, yaitu:

- a. Ibu Rostiah, usaha jualan kopi dan mie siram, berada di Jl. Barawaja Poros, samping tol Reformasi
- b. Bapak Mustakim Iskandar, usaha jualan pop ice dan mengelola usaha ikan bakar milik kerabat, Jl. Tamalate 1, Depan UNM Gunung Sari
- c. Ibu Indah Intan Abdullah, usaha jahit, Moncongloe.

---

<sup>86</sup> Wahdah Islamiyah, “sejarah singkat berdirinya Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, (Di akses tanggal 31 Juli 2019).

### 3. Visi dan Misi Wahdah Islamiyah

Visi utama Wahdah Islamiyah yaitu<sup>87</sup> :

“Wahdah Islamiyah Menjadi Ormas Islam yang Eksis Secara Nasional Pada Tahun 1452 H/2030 M”

Eksis yang dimaksud dalam visi adalah :

- a. Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua Provinsi di Indonesia.
- b. Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.
- c. Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota).
- d. Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim.
- e. Tersedia 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (Ma'had'Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni Tadribuddu'at dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni Tahfidz Qur'an yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD.
- f. Keberadaan Lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat pemerintah setempat di tiap DPD. Dikenal dan diakui diukur dengan : 1) Adanya

---

<sup>87</sup> Wahdah Islamiyah, “Visi Misi Wahdah Islamiyah”, *Situs Resmi Wahdah Islamiyah*. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, (Di akses tanggal 31 Juli 2019).

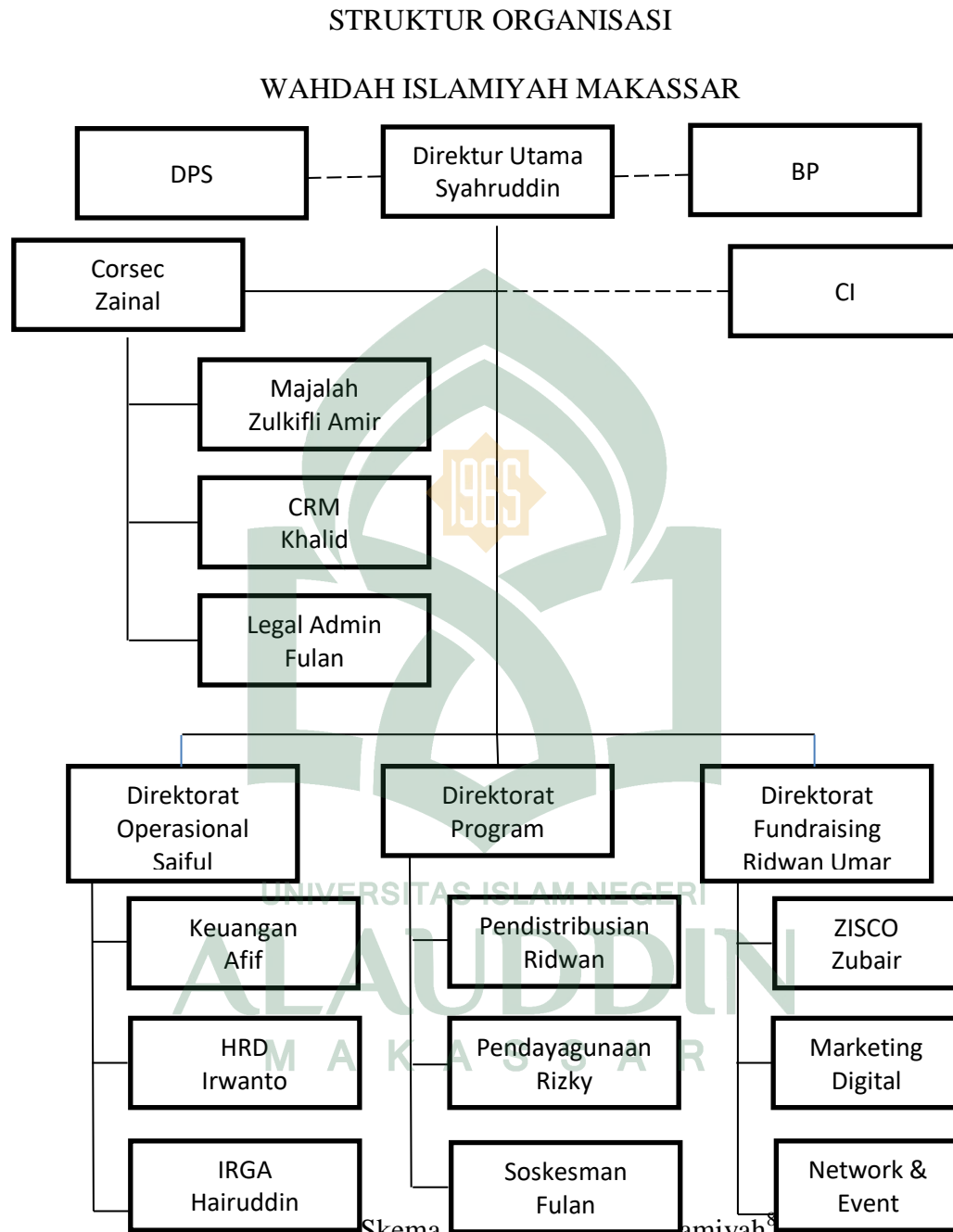
kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga setidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, atau sosial. 2) Adanya Legalitas dari Pemerintah

- g. Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana pendidikan.
- h. Memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin.
- i. Memiliki unit usaha kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat.
- j. Memiliki media dakwah dan informasi.
- k. Memiliki lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedakah.

Misi:

- a. Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
- b. Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasehati).
- c. Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas.
- d. Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelapor dalam berbagai bidang kehidupan.

#### 4. Direksi Kantor Wahdah Islamiyah



Gambar 4.1 Skema Direksi Wahdah Islamiyah<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Arsip Dokumen Wahdah Islamiyah, Tanggal 21 Agustus 2019.



## 5. Program-Program LAZIS Wahdah

Lazis Wahdah Islamiyah dari sejak tahun 1422 H/ 2002 H telah berpengalaman untuk menyalurkan dan ZIS kaum muslimin untuk perkembangan dakwah Islamiyah maupun pertolongan kepada sebagai umat Islam yang layak menerimanya, di antaranya adalah<sup>89</sup>:

### a. Program Dakwah/Hidayah

#### 1) Da'iQu (Da'I Qur'an)

Da'iQu merupakan pemberdayaan da'i guna menyebarkan dakwah Islam ke berbagai pelosok negeri. Selain sebagai pendamping dan penyeluruh masyarakat, para Dai ini juga akan menjadi fasilitator program pemberdayaan LAZIS Wahdah Islamiyah.

#### 2) Tebar Al-Qur'an Nusantara

Distribusi Al-Qur'an ke daerah minoritas dan daerah terpencil , untuk memberantas buta aksara Al-Qur'an.

#### 3) RumahQu (Rumah Qur'ani)

Rumah Tahfizh sebagai wadah pembinaan kelslamaan bagi anak-anak dan remaja usia sekolah.

#### 4) Bebaga Bersama Muallaf

Kegiatan pembinaan yang ditunjukkan bagi muallaf, berupa pendampingan/pembinaan rutin, pemberian santunan.

---

<sup>89</sup> Arsip Dokumen Wahdah Islamiyah, Tanggal 21 Agustus 2019.

#### 5) Tahfizh Community

Program pemberdayaan masyarakat untuk melahirkan komunitas penghafal Al-Qur'an, dan dibimbing langsung oleh Muhaffizh dan Muhaffizah yang mutqin.

#### b. Program Tahfizh/Juara

##### 1) Beasiswa Da'I

Program beasiswa da'I guna menjaga kesinambungan dakwah, serta menjaga keseimbangan kuantitas dan kualitas Da'I sebagai agen program dakwah.

##### 2) IBES (Islamic Boarding Entrepreneur School)

Program pendidikan LAZIS Wahdah Islamiyah yang memberikan dan menggabungkan pembinaan keIslamaan dan pelatihan kewirausahaan. Program ini diharapkan menghasilkan generasi muslim berkualitas dan memiliki keterampilan/skill siap kerja.

##### 3) BEST (Beasiswa Santri Tahfizh)

Ditunjukkan kepada anak kurang mampu/yatim piatu, sehingga dapat memberikan semangat para santri untuk menjadi penghafal Al-Qur'an yang mutqin.

##### 4) Sekolah Guru Tahfizh

Program yang bertujuan untuk menghasilkan pembina dan pengajar tahfizh handal dan berkualitas, demi mewujudkan Satu Rumah Satu Hafizh.

##### 5) Berarti (Berkah Beasiswa Prestasi)

Beasiswa pendidikan untuk memenuhi hak-hak pendidikan anak-anak kurang mampu/yatim untuk semua jenjang pendidikan.

c. Program Wahdah Peduli

1) Bersatu (Berkah Santunan Yatim Dhuafa)

Bantuan biaya hidup untuk anak yatim dhuafa, diharapkan dapat memberikan semangat bagi anak-anak yatim dhuafa.

2) Peduli Lingkungan

Melalui program peduli lingkungan, LAZIS Wahdah Islamiyah berusaha meningkatkan kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam. Bentuk program ini berupa edukasi, aksi penghijauan aksi bersih-bersih.

3) Peduli Kemanusiaan

Program kemanusiaan secara terpadu berupa kegiatan mitigasi, rescue dan rehabilitasi, meliputi : edukasi, pelatihan relawan, trauma healing, pemenuhan kebutuhan hidup, dan rehabilitasi infrastruktur.

d. Program Kemandirian

1) Perintis (Pelatihan Keterampilan dan Bisnis)

Program pelatihan keterampilan, yang akan melahirkan angkatan kerja siap guna dan siap pakai.

2) Bina Usaha Mikro Nusanatara

Menumbuhkan wirausaha sukses dan mandiri berbasis individu/kelompok dengan pemberian bantuan modal, pendampingan saran prasarana dan penguatan produk.

### 3) Wirausaha Ibu Mandiri

Usaha untuk mensejahterakan ibu-ibu janda yang tidak produktif, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dari permasalahan hidup dengan program kewirausahaan dan pelatihan.

### e. Berkah Sehat

#### 1) Berkemas (Berkah Kesehatan Masyarakat)

Program layanan kesehatan LAZIS Wahdah Islamiyah berupa bantuan biaya pengobatan dan edukasi hidup sehat untuk dhuafa.

#### 2) Klinik Sehat

Penyediaan fasilitas layanan kesehatan berupa pengobatan gratis, konsultasi kesehatan, pemeriksaan ibu dan anak, bekam, dan terapi kesehatan.

#### 3) Ambulance Gratis

Program layanan LAZIS Wahdah Islamiyah berupa ambulance gratis yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu, berupa pelayanan antar jenazah dan pengobatan. Juga untuk operasional kebencanaan.

#### 4) Khitanan Massal

Khitanan massal atau sirkumsisi adalah program layanan LAZIS Wahdah Islamiyah untuk anak yatim dhuafa. Program ini memudahkan masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan syariat tersebut.

### **B. Pemanfaatan Dana Zakat**

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh muslim yang telah

memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>90</sup> Adapun tujuan zakat yaitu dari pihak para wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan masyarakat sosial.<sup>91</sup> Jadi, dapat disimpulkan tujuan zakat untuk keberlangsungan hidup ummat yang mana terkhusus untuk peningkatan taraf hidup muzakki.

Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, dan Allah SWT menyandingkan zakat sejajar dengan perintah shalat, sesuai dengan firman Allah Q.S At-Taubah / 9 : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>92</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda. Kedua ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan

---

<sup>90</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 3

<sup>91</sup> Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, h. 19

<sup>92</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

sholat, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta.<sup>93</sup>

Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif dan produktif, cara konsumtif yaitu memberi zakat kemudian langsung dikonsumsi, sedangkan cara produktif yaitu memberi zakat untuk dikelola dan dikembangkan menjadi modal usaha yang akan membantu perbaikan ekonomi *mustahiq* dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* dananya tidak di habiskan, akan tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dengan melaksanakan program kemandirian.

Program Berkah Mandiri merupakan salah satu program yang ada di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, dalam program ini terdapat tiga program khusus yaitu pelatihan keterampilan dan bisnis, bina usaha mikro nusantara, dan wirausaha ibu mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan bantuan dana usaha dalam bentuk usaha mikro maupun dalam bentuk

---

<sup>93</sup>Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, h. 69.

pelatihan keterampilan bagi mustahiq. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa mustahiq binaan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar :

#### 1. Usaha Jualan Pop Ice dan Ikan Bakar

Usaha jualan Pop Ice dan Ikan Bakar merupakan usaha yang dilakukan oleh Bapak Mustakim Iskandar (31thn), yang berada di Jl. Tamalate 1, Depan UNM Gunung Sari. Bapak Mustakim Iskandar merupakan salah satu penerima dana bantuan berupa modal dana usaha. Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber :

“Bapak Iskandar Mustakim (31 tahun), beliau menjawab : *iye* saya diberikan dana sama lazis wahdah berupa dana tunai Rp. 500.000,00- itu hari sebelum lebaran tahun ini (2019) terus *dikasika* lagi sekitar Rp. 1.000.000,00- dalam waktu 1 bulanan itu kalau tidak salah, katanya dia janji lagi untuk dibukakan dagangan karena ini masih punya orang saya kelola, dananya saya pake untuk jual-jualan pop ice karena yang ikan bakar dari teman *ji* ikannya nanti bagi hasil*ka*. *Alhamdulillah* sekali ada dana bantuan awalnya juga saya nda tau kalo mau dikasi begini tiba-tiba *ji* datang katanya dari lazis wahdah baru dikasika amplop *Alhamdulillah* untuk tambah modal karena pernah*ka* juga nda menjual selama 2 minggu karena sakit anakku dan terbantu sekali dengan adanya dana yang dikasikan dari wahdah”<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iskandar Mustakim (31 tahun), sebagai penjual pop ice dan ikan bakar sangat terbantu dalam penambahan modal usaha yang diberikan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah karena mengingat pada saat penyerahan dana zakat tersebut si penerima sedang mengalami musibah. Wawancara tersebut juga menunjukkan terlaksananya program kemandirian yang di programkan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah.

---

<sup>94</sup> Mustakim Iskandar (31 tahun), Salah Satu Penerima Dana Zakat Produktif AZIS Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, 27 Juli 2019.

## 2. Usaha Jualan Campuran

Usaha jualan kopi dan mie siram merupakan usaha yang dilakukan oleh ibu Rostiah (49 tahun) yang berada di Jl. Barawaja Raya Samping Tol Reformasi. Ibu Rostiah juga merupakan penerima bantuan dana zakat produktif dari LAZIS Wahdah Islamiyah pada bulan Mei 2018 yang mana Ibu Rostiah sebelum menerima bantuan dana usaha tersebut beliat tidak memiliki usaha yang dapat dijalankan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rostiah:

“Sudah dua lebaran ini hampir 2 tahun, karena pas bulan puasa toh datang bawa kanvas ini lemari sama modal, terus modalnya itu saya kasi belimi bahan untuk jualan, wahdah ji kasian ini kasi menjualka, karena mau sekaligus menjual na nda ada modal ku. Awalnya itu kebetulan ada tante dia kasi tau ka dia bilang coba-cobako kesana (LAZIS Wahdah) nak siapa tau bisako na bantu jadi saya kesanami ke kantor eh Alhamdulillah datang i. Pertamanya ini nda begini, kecil-kecilji ini dibelakang cuma jual-jual kopi sekarang yah Alhamdulillah, ini begini kosong karena orang proyek karena makan malam banyak Alhamdulillah sudah hampir Rp.3.000.000,00- mi ini besok diterima lagi yah dibelikan lagi belanjaan untuk jualan. Pernah lagi dikasika Rp.500.000,00- sekitar sebelum puasa ini (2019). Dulunya ada adekku jualan bambu disini tapi meninggalkan nah nda ada yang kelola kasian jadi berfikir ka apa kasian ini kujual supaya bisa ku pake makan na nda adami suamiku ada juga kakek, nenek, anakku juga sekolah. Di Pampangka dulu tinggal kontrak-kontrak terus ada panggilka disini tinggal 5 orang, waktu saya dulu nda menjual kasian tiap harika dikata mau menangis sekarang syukur Alhamdulillah Wahdah betul-betul membantu. Penghasilan lebih mi dari Rp. 1.000.000 perbulan untuk kebutuhan sehari-hari, mudah-mudahan dibantu lagi kasian supaya lebih meningkat ini jualanku yah bantu-bantu juga yang lain”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rostiah (49 tahun), bantuan yang diberikan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah dapat membantu Ibu Rostiah (49 thn) berupa uang tunai dan lemari kaca yang digunakan untuk mendirikan usaha warung

---

<sup>95</sup> Rostiah (49 tahun), Salah Satu Penerima Dana Zakat Produktif LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, 29 Juli 2019.



kecil-kecilan, dari usaha yang Ibu Rostiah dirikan beliau dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya yang mana beliau tinggal di rumah semi permanen di samping tol Reformasi yang tiap saat bisa saja terjadi penggusuran. Harapan Ibu Rostiah, Wahdah Islamiyah dapat memberikan lagi bantuan agar dapat meningkatkan lagi usaha yang ia dirikan serta meratanya pendistribusian dana zakat produktif dapat meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik.

### 3. Penjahit Intan

Jahit Intan merupakan usaha yang digeluti oleh Ibu Indah Intan Abdullah (55 thn) yang tinggal di Moncongloe. Ibu Intan merupakan seorang penerima zakat produktif dari LAZIS Wahdah Islamiyah pada periode Agustus 2019. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu intan:

”barukah beberapa ini dikasika dana sama LAZIS Wahdah katanya modal usaha 500 ribu, awalnya kebetulan ini ada didekatnya alfa mart ada tulisan bantuan Lazis Wahdah, lamami saya liat disitu, terus saya duduk distitu kenapa ada itu, terus saya tanya bagaimana kamu dapat, terus ada ustadz dibelakang sering nitip anaknya disini, ustadz disebelah ada bantuannya, oh iya ibu nanti saya kasih tau, terus pernah saya dapat informasi dari teman itu bisa dibantu dari lazis berupa barang, pas kebetulan ajaran baru banyak orderan, jadi saya bilang, mungkin bisa dibantu beli benang. Sebernnya dulu terimaka juga kursus menjahit tapi begitumi, setelah ada masalah keluarga tidak adami tempat yang bisa kupakai untuk terima kursus jahit”<sup>96</sup>

Ibu Intan merupakan penerima dana bantuan dari LAZIS periode Agustus 2019 ini, yang mana menurut beliau kondisinya saat ini memang sangat membutuhkan bantuan modal untuk membeli perlengkapan bahan jahitnya, meskipun dana yang dikucurkan memang relatif lebih kecil dibandingkan *mustahiq* lainnya, hal

---

<sup>96</sup> Intan Indah Abdullah (55 tahun), Salah Satu Penerima Dana Zakat Produktif LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, 8 Agustus 2019.

ini dikarenakan tahap pemberian modal memang tidak langsung diberikan dalam jumlah yang besar, akan tetapi pada tahap selanjutnya akan diberikan lagi sejumlah dana setelah adanya pengawasan dan evaluasi dari pihak LAZIS Wahdah Islamiyah.

### ***C. Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif***

Efektif secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, yang mana makin besar presentase yang dicapai, maka makin tinggi pula efektivitasnya.<sup>97</sup> Efektivitas dana zakat produktif diukur dengan melihat seberapa banyak *mustahiq* yang dapat meningkatkan pendapatannya melalui dana zakat produktif dalam jangka waktu yang relatif panjang

LAZIS Wahdah Islamiyah menerapkan perekrutan untuk penerimaan program kemandirian yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan seperti fakir, miskin, dan fisabilillah serta memberdayakan umat. Total *muzakki* di Wahdah Islamiyah berjumlah 6440 orang terhitung sejak 2012, yang rutin diberikan bantuan melalui zakat konsumsi maupun zakat produktif berjumlah 2500 orang hingga saat ini.<sup>98</sup>

LAZIS Wahdah Islamiyah mengatur setiap program yang dijalankannya

---

<sup>97</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 10.

<sup>98</sup> Saiful, Direktur Operasional LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, 8 April 2019.

dengan seksama, meskipun jumlah masyarakat penerima zakat produktif binaan LAZIS Wahdah Islamiyah masih sedikit. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Saiful selaku sekretaris LAZIS Wahdah Islamiyah Kota Makassar bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengatur pendistribusian dana zakat produktif seperti :

“Kalau *mustahiq*nya itu ada beberapa tahapan sampai dikatakan orang itu layak diberikan bantuan, mulai dari perekrutan sampai pemberdayaan itu kita lakukan pendampingan ke mereka sampai mereka bisa dilepas”<sup>99</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahapan perekrutan *mustahiq* perlu dilakukan beberapa tahapan hingga ia diputuskan menjadi *mustahiq*, setelah itu para *mustahiq* akan dilakukan pemberdayaan sesuai yang dibutuhkan masing-masing *mustahiq* tersebut hingga adanya pendampingan sampai *mustahiq* tersebut dapat mandiri dengan sendirinya.

## 1. Peran LAZIS Wahdah Islamiyah

### a. Perekrutan *Mustahiq*

- 1) *Mustahiq* yang membutuhkan dana mengajukan prosposal untuk pengembangan usaha yang ingin dijalankan.
- 2) Pihak LAZIS Wahdah Islamiyah sendiri secara langsung melakukan survei lapangan untuk calon *mustahiq* yang ingin diberdaya.
- 3) Melakukan seleksi dan verifikasi berkas data *mustahiq* yang masuk untuk melihat kelayakan menerima program pemberdayaan.

---

<sup>99</sup> Saiful, Direktur Operasional LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, 8 April 2019.

- 4) Melakukan survei langsung ketempat tinggal *mustahiq* untuk mencocokkan atau menverivikasi langsung data yang dimasukkan oleh *mustahiq*.
- 5) LAZIS Wahdah Islamiyah, melakukan musyawarah untuk menentukan apakah *mustahiq* tersebut layak atau tidak diberikan dana program pemberdayaan
- 6) Jika *mustahiq* tersebut layak menerima dana program pemberdayaan, maka bagian direktur program dan pemberdayaan melakukan penganggaran untuk diberikan dana kepada *mustahiq* tersbut. Namun sebeleum pencairan program pemberdayaan tersebut harus persetujuan disposisi dari pimpinan LAZIS Wahdah.<sup>100</sup>

b. Pemberdayaan *Mustahiq*

Setelah melakukan perekrutan terhadap penerima dana zakat produktif, LAZIS Wahdah Islamiyah melakukan pemberdayaan dengan memberikan bantuan uang tunai maupun barang yang dibutuhkan untuk memenuhi keberlangsungan usaha yang dijalankan. LAZIS Wahdah Islamiyah juga melakukan pemberdayaan pelatihan untuk mengasah kemampuan masyarakat menghadapi dunia kerja yang luas.

c. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dan evaluasi terhadap *mustahiq* oleh LAZIS Wahdah Islamiyah setelah pemberdayaan berlangsung, pihak LAZIS Wahdah Islamiyah melakukan pengawasan dan evaluasi tersebut secara bertahap yaitu pertiga bulan dan apabila dalam masa pendampingan *mustahiq* tersebut masih perlu pembinaan maka

---

<sup>100</sup> Saiful, Direktur Operasional LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, Wawancara, Tanggal 15 Juli 2019

pihak LAZIS Wahdah Islamiyah memberikan lagi bantuan sesuai apa yang diperlukan seperti pemberian dana kepada *mustahiq* untuk lebih meningkatkan usahanya.

Evaluasi di tinjau dari segi peningkatan jumlah pendapatan yang didapatkan oleh *mustahiq* setelah diberikan pemberdayaan secara produktif.

## 2. Efektivitas Pengelolaan dan Zakat Produktif

Penghimpun dana zakat di LAZIS Wahdah Islamiyah dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung kantor LAZIS Wahdah Islamiyah atau dapat diberikan dengan menstrasfer via Rekening, diantaranya.

Zakat	No.Rek. Lazis Wahdah	Infaq
496 900 9008	Mandiri Syariah	497 900 9007
801 004 8366	Muamalat	801 004 8367
400 123 4008	BNI Syariah	500 123 5005
100 660 4206	BRI Syariah	100 660 4222

Tabel 4.1 Arsip Dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah<sup>101</sup>

Menurut peneliti layanan transfer sangat memudahkan bagi *muzakki* yang tidak dapat secara langsung memberikan dana zakatnya. Hal ini juga merupakan inovasi dari perkembangan zaman terlebih semua rekening menggunakan Bank Syariah untuk menghindari adanya riba/bunga.

---

<sup>101</sup> Arsip Dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, Tanggal 8 April 2019.

Dana yang telah dihimpun oleh LAZIS Wahdah Islamiyah selanjutnya didistribusikan dalam bentuk program kemandirian yang mana program ini bertujuan untuk membantu masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya namun terhendak di bidang modal dan pengembangan keterampilan. Dengan kemandirian ini juga bertujuan untuk memberikan modal secara mudah, cepat, terukur, terarah tanpa adanya beban yang harus dikembalikan dikarenakan dana ini bersifat hibah.

Berikut pelporan dana penghimpun zakat dan pengguna zakat yang di peroleh LAZIS Wahdah Islamiyah terhitung dari 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2019 :

**LAPORAN SUMBER DANA PENGGUNAAN DANA  
KANTOR PUSAT OPERASIONAL  
PERIODE 1 Agustus 2018 - 31 Juli 2019**

NO	PENERIMAAN	JUMLAH
1	PENERIMAAN ZAKAT	
2	Penerimaan Zakat Profesi	Rp 35,570,745.00
3	Penerimaan Zakat Maal	Rp 1,289,626,059.00
4	Penerimaan Zakat Fitrah	Rp 26,543,700.00
5	Penerimaan Fidyah	Rp 37,945,000.00
6	Bagi Hasil atas penempatan dana zakat	Rp 120,642.14
7	PENERIMAAN INFAQ	
8	Penerimaan Infaq Terikat	Rp 7,479,056,549.89
9	Penerimaan Infaq Tidak Terikat	Rp 3,362,522,118.00
10	Penerimaan Lain-lain	Rp 204,821,717.00
11	Penerimaan Dana Non Halal	Rp 9,750,000.00
12	PENERIMAAN WAKAF	Rp 3,507,800.83
13	PENERIMAAN AMIL	Rp 1,199,085,460.00
	JUMLAH	Rp 13,648,549,791.86

NO	PENYALURAN	JUMLAH
1	PENYALURAN IURAN DANA ZAKAT	
2	Penyaluran Zakat Untuk Fakir Miskin	Rp 112,970,000.00
3	Penyaluran Zakat Untuk Muallaf	Rp 4,630,000.00
4	Penyaluran Zakat Untuk Fisabilillah	Rp 956,025,000.00
5	Penyaluran Zakat Untuk Amil	Rp 209,432,451.00
6	Beban Penyaluran Aset Kelolaan Zakat	Rp 392,500.00
7	Penyaluran Dana Zakat Via Pusat	Rp 25,175,000.00
8	PENYALURAN DAN INFAQ	
9	Penyaluran Infaq Terikat	Rp 4,826,227,990.00
10	Penyaluran Infaq Tidak Terikat	Rp 3,360,696,589.00
11	Penyaluran Infaq Lainnya	Rp 50,000.00
12	Penyaluran Dana Wakaf	Rp 2,000,000.00
13	Penyaluran Dana Amil	Rp 440,915,447.00
14	TAGIHAN LITRIK, TELEPON, AIR DAN IURAN	Rp 41,844,786.00
15	PEMELIHARAAN AKTIVA	Rp 12,907,500.00
16	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	Rp 152,210,671.00
17	BIAYA ENTERTAINMENT	Rp 1,220,700.00
18	BIAYA PENGIRIMAN DAN KOMUNIKASI	Rp 49,089,770.00
19	BIAYA INFORMASI	Rp 11,214,995.00
20	BIAYA TRANSPORTASI	Rp 36,023,647.00
21	BIAYA ZIS	Rp 35,817,500.00
22	BIAYA LAIN-LAIN	Rp 3,000,000.00
	JUMLAH	Rp 10,281,844,546.00

SURPLUS (DEFISIT)	Rp	3,366,705,245.86
SALDO AWAL	Rp	-
SALDO AKHIR	Rp	3,366,705,245.86

Tabel 4.2: Arsip Dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah<sup>102</sup>

Berdasarkan data laporan keuangan yang diperoleh dari Arsip dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar penerimaan dana zakat yang diperoleh sebanyak Rp. 13,648,549,791.86 -, dan untuk penyaluran dana zakat fakir miskin sebanyak Rp.

<sup>102</sup> Arsip Dokumen LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, Tanggal 26 Agustus 2019.

112.970.000,- angka ini tentu saja berbeda jauh dengan penggunaan dana zakat untuk fisabilillah yang jumlah penyalurannya sebanyak Rp. 956.025.000,00-. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Saiful selaku Direktorat Operasional yang menyatakan bahwa :

“memang kalo di Wahdah kita masih lemah penyaluran zakatnya untuk zakat produktif karena kita lebih fokus ke wilayah dakwahnya jadi lebih banyak penyalurannya untuk fisabilillah, kita bantu fasilitasi mereka untuk berdakwah”<sup>103</sup>

Fokus program yang diterapkan pada LAZIS Wahdah Islamiyah mempengaruhi jumlah banyaknya dana yang dikucurkan untuk zakat tersebut. Seperti halnya pada program dakwah ini, hampir mencapai angka 70% dana di salurkan pada zakat fisabilillah yang mana masuk dalam program dakwah, dana ini untuk memfasilitasi program dakwah yang terselenggara.

Menurut Cambel J.P, pengukuran secara umum dan yang paling menonjol dalam efektivitas ialah sebagai berikut:<sup>104</sup>

Tabel 4.3 Tolak Ukur Efektivitas Menurut Cambel J.P

NO	TOLAK UKUR	Efektivitas
1	Keberhasilan Program	Tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya.
2	Keberhasilan Sasaran	Mengerjakan sesuatu dengan benar, sesuai dengan yang seharusnya, diselesaikan sesuai rencana dan aturan.
3	Kepuasan Terhadap Program	Mencapai tingkat di atas pesaing, mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
4	Tingkat Input dan Output	Membawa hasil yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat

<sup>103</sup> Saiful, Direktur Operasional LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, Tanggal 6 Agustus 2019.

<sup>104</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simomora, h. 121



5	Pencapaian Tujuan Menyeluruh	Menangani tantangan masa depan (manfaat yang diberikan berlaku jangka panjang)
---	------------------------------	--

Berdasarkan Pengukuran tersebut maka peneliti menyusun suatu indikator

keberhasilan di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar sebagai berikut :

Tabel 4.4 Indikator LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar

No	INDIKATOR	Sesuai	Tidak Sesuai
1	LAZIS Wahdah Islamiyah melaksanakan tiap programnya dengan maksimal.		✓
2	Setiap program yang dijalankan telah tepat sasaran pada <i>mustahiq</i> nya.		✓
3	Mustahiq memperoleh manfaat dari dana yang disalurkan	✓	
4	Penghimpunan dan penyaluran zakat dana produktif terlaksana dengan baik.		✓
5	Zakat dana produktif telah tersalurkan secara menyeluruh ke masyarakat		✓
6	Melalui LAZIS <i>mustahiq</i> dapat berubah menjadi <i>muzakki</i> yang baru		✓

Indikator keberhasilan pada tabel 4.3 merujuk pada ketidaksesuaian indikator keberhasilan dengan realisasi efektivitas yang terjadi di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar. Hal ini dapat dilihat dari ketidakefektifan pelaksanaan program, sasaran mustahiq, penyaluran zakat, serta manfaat jangka panjang yang diberikan *muzakki* kepada *mustahiq*. Ketidaksesuaian yang paling menonjol dari LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar adalah sasaran zakat yang tidak sesuai dengan fiqih prioritas hal ini dapat dilihat pada gambar 4.4 dimana penyaluran zakat terbesar disalurkan kepada Fisabilillah yaitu sebesar Rp 956,025,000.00 sedangkan untuk penyaluran zakat kepada fakir miskin sebagai zakat produktif hanya sebesar Rp 112,970,000.00 yang tersalurkan kepada 14 mustahiq selama 3 tahun. Selain jumlah dana zakat yang

disalurkan sasaran mustahiq pun masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan realitas kemiskinan di Kota Makassar. Ketidakefektifan ini terjadi karena LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar hanya memprioritaskan penyaluran dana kepada Fisabilillah untuk tujuan dakwah. Sedangkan Allah SWT telah mengatur penyaluran zakat berurutan sesuai golongan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah / 60 : 9 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٩ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>105</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat

ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim

---

<sup>105</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196.

yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### 3. Kendala LAZIS Wahdah Islamiyah dalam menjalankan program kemandirian

Pada setiap usaha yang dijalankan untuk mencapai suatu tujuan yang optimal tentunya tidak lepas dari kendala atau masalah yang dihadapi. Begitu halnya LAZIS Wahdah Islamiyah, upaya yang dilakukan untuk menjalankan program kemandirian ini memiliki beberapa kendala seperti penuturan Bapak Ridwan selaku kordinator pendistribusian yang menyatakan:

“biasa ada nda sesuaiki laporan mustahiq sama dilapangan, dia bilang tidak mampu ternyata pas kita survey punya motor, adaji juga keluarganya yang mampu bantuki, kekurangan SDMki juga iya jadi sulitki untuk terjun langsung secara luas toh”<sup>106</sup>

Kendala yang terjadi meliputi 2 faktor, yaitu: faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang terjadi ialah ketidaksesuaian hasil survei lapangan dengan

---

<sup>106</sup> Ridwan, Tim Pendistribusian Zakat di LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, *Wawancara*, 6 Agustus 2019.

pengajuan sebagai *mustahiq*. Sedangkan faktor internal ialah minimnya SDM untuk mengatur program kemandirian agar sistem pengawasan maupun evaluasi dapat berjalan dengan optimal. Perlu adanya SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan maksimal, sehingga *mustahiq* yang telah masuk dalam program kemandirian dapat meningkatkan usahanya sampai mandiri dan menjadi *muzakki*. Hal ini tentu saja akan membuat para *muzakki* yang baru membantu masyarakat yang kurang mampu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemanfaatan dana zakat produktif telah disalurkan pada fakir miskin yang membutuhkan dengan pemberian bantuan dana untuk modal usaha yang mereka akan jalankan atau yang sudah dijalankan. Penyaluran ini dinilai efektif dari aspek pengadaan dan pengembangan usaha para *mustahiq* binaan LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar, namun di lain sisi para *mustahiq* tersebut belum mampu menjadi *muzakki* baru.
2. LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar dalam perannya untuk efektivitas pengelolaan dana zakat produktif dinilai kurang efektif, karena jumlah *mustahiq* tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan perbandingan penyaluran dana zakat produktif dengan penerimaan sangat jauh persentasenya, yang mana dana zakat ke sektor produktif hanya berkisar 0,9% dengan nilai Rp.112.970.000 sedangkan pemasukan yang diterima mencapai nilai Rp.1.389.804.146.

#### B. Saran

Saran untuk LAZIS Wahdah Islamiyah sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian zakat harus melaksanakan pengawsan dan pengevaluasian serta

mengatur pengelolaan dana zakat produktif dengan lebih baik dan optimal secara menyeluruh agar masyarakat binaan LAZIS Wahdah Islamiyah lebih meningkat dalam segi kuantiti dari tahun ketahun. Hal ini membuat LAZIS Wahdah Islamiyah lebih efektif dalam menjalankan programnya serta masyarakat umum dapat merasakan dana zakat produktif tersebut.

Untuk para *mustahiq* yang telah mendapat dana zakat produktif tersebut agar hasil usaha yang didapatkan bisa digunakan dengan cara yang lebih optimal sehingga makin produktif, serta *mustahiq* dapat menjadi *muzakki-muzakki* baru untuk membantu masyarakat pada umumnya yang membutuhkan bantuan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Teguh, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, (Mei 2018) <http://www.researchgate.net> (Diakses tanggal 1 Maret 2019).
- Azwar Saifuudin Dan Tri Endro Cahyono. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007.
- Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simomora, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Daymon Christine Dan Halloway Immy Halloway. *Metode Riset Kualitatif*. PT Bentang Pustaka. Yogyakarta. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Drajat, Zakia, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Emzir. *Metode penelitian kualitatif analisis data*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Fuad Hafidz Halimi. *Bersyukur dengan Zakat*. PT. Adfale Prima Cipta. Jakarta Timur. 2013.
- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Handayani, Pengantar *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1980
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infak*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen edisi revisi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Khalifah, Muh. Mustamin, Dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. CV. Berkah Utami. Makassar. 2009.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliku Press, 2010.
- Kuncoro Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Ed.3. Erlangga. Jakarta. 2009.

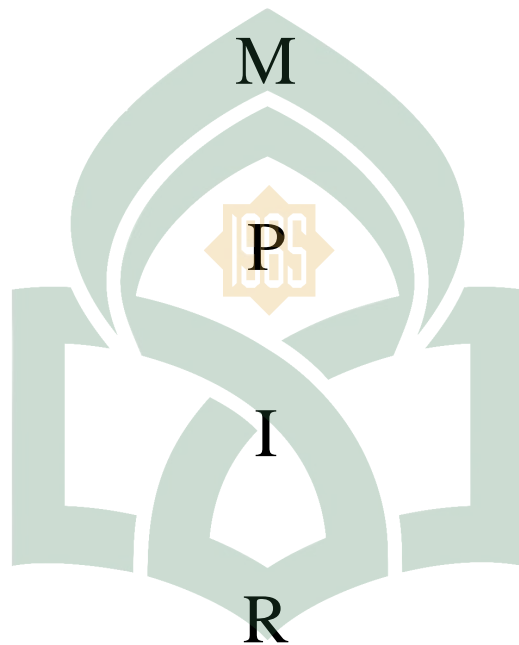
- Muchlis Saiful. *Akuntansi Zakat*. Alauddin University Press. Makassar. 2014.
- Mufidah. *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No. 2 Desember 2016. 325-341
- Muin, Asrhawi, “Kemenag Sebut Potensi Zakat di Makassar Sangat Besar”, *Sulselsatu Online*. 18 November 2018. <http://www.sulselsatu.com> (14 Februari 2019).
- Muin Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Alauddin University Press. Makassar. 2011.
- Mulyani Sri. *Analisis Sistem Laporan Dana Zis Pada Baitul Maal Muamalat (Bmm) Jogjakarta*. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 5 No. 2 Oktober 2008.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Rosdakarya 2011
- Purbasari Indah, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, MIMBAR HUKUM Volume 27, Nomor 1, Februari 2015.
- Rani Rahmat. Dkk. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017).
- Rokhmah Dewi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember University Press. Jember. 2014
- Sabrina Shahnaz. *Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, h.316-317.
- Shadily, A.B. Pridodgdo Hasan, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Siagian, Sondang P, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1990.
- Sularno M. *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang*



- No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). Jurnal Ekonomi Islam. Volume IV. No. 1. Juli 2010. h. 36-37.
- Sumadi. *Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 03. No. 01. Maret 2017. h.17.
- Syam, Fahrizal, “Hingga September 2018, Baznas Makassar Kumpulkan Zakat Rp. 9,5 Milyar,” Tribun Makassar Online 29 oktober 2018, makassar.tribunnews.com (14 Februari 2019).
- Tarigan, Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).
- Tim Pengelola Zis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah & Pengelolaanya*. Baznas Kota Makassar. Makassar. 2016.
- Tri Endro Cahyono “*analisis hukum Islam terhadap praktek menimbang para pedagang muslim di pasar godong kabupaten grobogan*”.
- Wahdah, “*Profil Lazis Wahdah Islamiyah*”, Situs Resmi Wahdah. <http://wahdah.or.id> (14 Februari 2019).
- Wahid, Hidayat Nur, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Wardayati Siti Maria Dan Imaroh Siska Putri. *Analisis Pengendalian Intern Coso Pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) (Studi Kasus Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember)*. Analisa Journal of Social Science and Religion Volume 22 No. 02 Desember 2015. h. 228

L

A



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

N

# Manuskrip Wawancara

Peran Lembaga Amil Zakat dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif

(Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Makassar)

## A. Amil Zakat

1. Sejak kapan terbentuknya LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar ?
2. Berapa pendapatan dana ZIS setiap tahunnya (3 tahun terakhir) ?
3. Berapa pendapatannya dana zakat produktif setiap tahunnya (3 tahun terakhir) ?
4. Bagaimana model pengelolaan (pengimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pendampingan) dana zakat di LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar ?
5. Apakah pengelolaan yang dilakukan LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar sudah mencapai target yang diharapkan ?
6. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dari dana zakat (zakat konsumtif dan zakat produktif) ?
7. Apakah zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* sudah mencukupi untuk membantu para *mustahiq* ?
8. Apakah dana zakat yang didistribusikan berlaku pada delapan ashnaf atau salah satu menjadi prioritas ?

9. Apakah dampak pengelolaan zakat yang dilakukan mampu mensejahterahkan masyarakat utamanya yang prasejahtera ?
10. Apa yang menjadi harapan LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar dalam pengelolaan dana zakat terkait dengan program penguatan ekonomi ?
11. Apa kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya ?
12. Apakah LAZIS Wahdah Islamiyah kota Makassar memiliki DPS dalam struktur kelembagaannya ?
13. Bagaimana langkah-langkah perbaikan terhadap pengelolaan dana zakat *mustahiq* ?

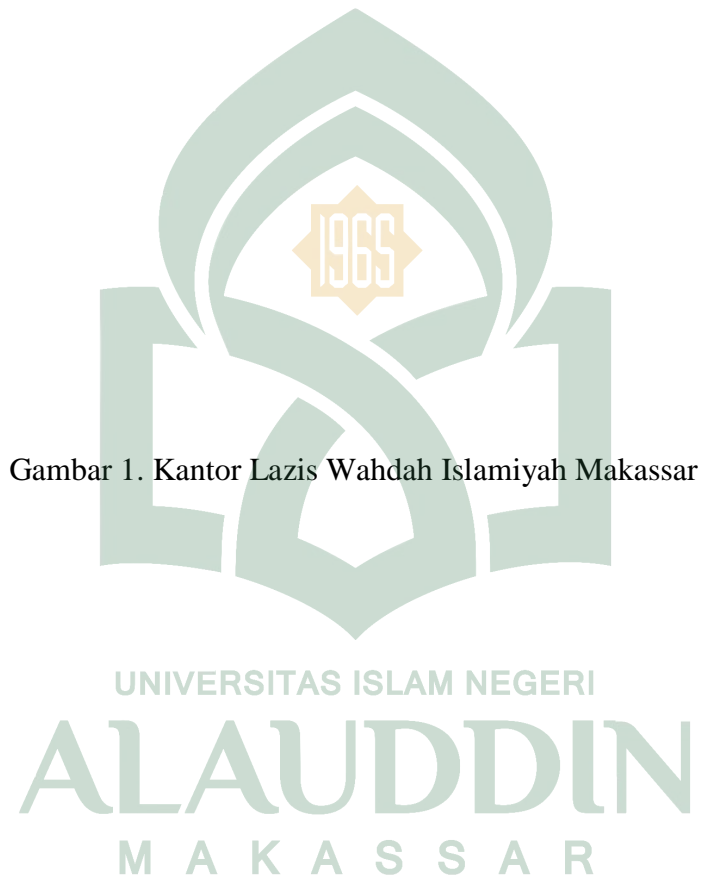
**B. Penerima Dana Zakat Produktif**

1. Nama Mustahiq :
2. Tingkatan Sekolah :
3. Umur Mustahiq :
4. Sudah berapa lama anda menjadi mustahiq dalam LAZIS Wahadah Islamiyah kota Makassar ?
5. Bantuan apa yang pernah anda terimadari LAZIS Wahadah Islamiyah kota Makassar ?
6. Apakah bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan hingga saat ini ?
7. Apakah bantuan tersebut mampu membantu meningkatkan ekonomi anda?
8. Apakah cara pendistribusian Zakat yang dilakukan LAZIS Wahadah Islamiyah kota Makassar sudah baik ?

9. Adakah saran yang mampu diberikan dalam pengelolaan Zakat yang dilakukan LAZIS Wahadah Islamiyah kota Makassar ?



## **Dokumentasi Penelitian**



Gambar 1. Kantor Lazis Wahdah Islamiyah Makassar

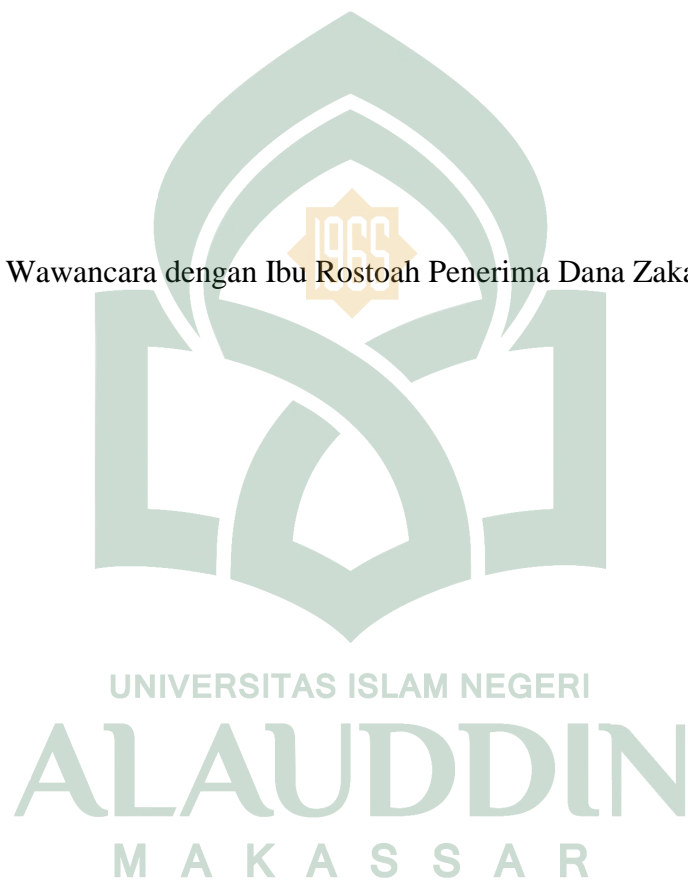
Gambar 2. Wawancara dengan Ustadz Saiful selaku Sekretaris LAZIS Wahdah  
Islamiyah Makassar

Gambar 3. Wawancara dengan Kakanda Ridwan Selaku Kordinator Pendistribusian



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Intan Penerima Dana Zakat Produktif

Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Rosteah Penerima Dana Zakat Produktif



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Mustakim Iskandar Penerima Dana Zakat  
Produktif





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Husni Mubaraq, lahir pada tanggal 28 Februari Maret 1995 di Kota Ujung Pandang Sulawesi Selatan, merupakan anak ke delapan (8) dari sembilan (9) bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Masdin Abdi dan Ibu Hj. Andryani Baso. Tahun 2000 memulai pendidikan di TK Teratai Makassar, kemudian di tahun 2001 melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Labuang Baji I Makassar, kemudian pada tahun 2007 melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Model Makassar dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Makassar dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam melalui jalur UMM (Ujian Masuk Mandiri).

Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2019. Pada tahun 2017 bulan Maret sampai Juni, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu' Ere Kabupaten Bantaeng.